

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di Era globalisasi dalam penyelenggaraan pemerintah saat ini *Good governance* merupakan tonggak dalam sebuah Negara, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera di dukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik. (tata pemerintahan yang baik) merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. *Good governance* telah menjadi isu sentral, dimana dengan adanya era globalisasi tuntutan akan penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah suatu keharusan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat.

Governance merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai kegiatan. *Good governance* mengandung arti hubungan yang sinergis di antara Negara, sector swasta, dan masyarakat. Hubungan sinergis di bangun dengan komunikasi yang terus terjalin dengan baik diantara tiga pilar tersebut untuk mewujudkan pembangunan bangsa yang mandiri.

Mewujudkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dibutuhkan komunikasi serta partisipasi dari pemerintah, sector swasta serta partisipasi dari masyarakat. Pembangunana di indonesia, khususnya di daerah terus di lakukan

melalui berbagai program. Dengan demikian, di perlukan pendekatan yang pelaksanaannya mengikutsertakan masyarakat.

Pendekatan partisipasi di sadari mutlak di perlukan dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukan memobilisasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan membiayai pembangunan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan, masyarakat sudah sewajarnya ikut berperan. Pemerintah harus bekerja bersama dengan masyarakat karena pemerintah bekerja bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk masyarakat. Upaya ini merupakan rangkaian proses menuju penguatan peran masyarakat, bukan hanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Dengan kuatnya peran masyarakat, penyelenggaraan pembangunan akan lebih di lakukan secara transparan, akuntabel dan berorientasi kepada rakyat atau bernuansa *good governance* di segala lapisan.

Partisipasi dalam penyusunan kebijakan pelayanan public adalah hak warga negara. Partisipasi bukan kewajiban melainkan kegiatan yang dilakukan dalam upaya menuntut pemenuhan hak – hak dasar masyarakat.¹ dalam Undang-Undang No. 9/2015 Tentang Pemerintahan Daerah, meletakkan partisipasi masyarakat sebagai elemen penting untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat; menciptakan rasa memiliki masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan daerah, menjamin terdapatnya transparansi, akuntabilitas dan

¹ Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Public*. Bandung :Cv Pustaka Setia. Hlm :225.

kepentingan umum; perumusan program dan pelayanan umum yang memenuhi aspirasi masyarakat.

Salah satu forum yang menuntut partisipasi masyarakat adalah melalui Musrenbang. Musrenbang merupakan forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah ². Penjelasan mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan juga di jelaskan dalam undang-undang 25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Menekankan tentang perlunya sinkronisasi lima pendekatan perencanaan yaitu pendekatan politik, partisipatif, teknokratis, 'bottom-up' dan 'top down' dalam perencanaan pembangunan daerah.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di program Musrenbang merupakan faktor penting dalam terwujudnya *good govrnance* (tata pemerintahan yang baik) di Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung yang mana tingkat keikutsertaan masyarakat baik itu dari pemerintah, sector swasta serta masyarakat di katakan belum mendekati harapan yang di inginkan. hal ini dapat di lihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Daftar Hadir Kegiatan MUSRENBANG Kabupaten Bandung 2016

No	Sidang Musrenbang	Jumlah Peserta Undangan	Realisasi
1	Sidang kelompok 1 : bidang fisik	43 <i>stakeholder</i>	11 <i>stakeholder</i>
2	Sidang kelompok 2: bidang ekonomi	24 <i>stakeholder</i>	6 <i>stakeholder</i>
3	Sidang kelompok 3: sosial budaya dan pemerintah	55 <i>stakeholder</i>	10 <i>stakeholder</i>
	Jumlah	122	27

(Sumber :data yang di olah oleh peneliti dari laporan hasil musrenbang 2016 Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung)

² UU No 25 tahun 204 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Dari data di atas, dapat di lihat bahwa tingkat keikutsertaan masyarakat dan para *stakeholder* masih belum maksimal dalam melaksanakan Musrenbang. Para undangan yang mana merupakan delegasi dari berbagai pihak, yaitu dari unsur pemerintahan, unsur delegasi kecamatan, serta para pemangku kepentingan atau organisasi-organisasi daerah, kurang maksimal dalam berpartisipasi. Pada sidang kelompok satu, yang di harapkan 43 *stakeholder* hadir dalam merumuskan mengenai bidang fisik tetapi hanya 11 *stakeholder* yang menghadiri kegiatan. Dalam sidang dua dalam bidang ekonomi di harapkan 24 *stakeholder* undangan hadir tetapi hanya 6 *stakeholder* yang menghadiri kegiatan. Serta dalam sidang tiga dalam sosial budaya dan pemerintah hanya 10 *stakeholder* yang hadir dari 55 *stakeholder* yang di undang. Dari laporan hasil Musrenbang pada diskusi kelompok lingkup bidang fisik bahwa masih adanya anggota tim musrenbang ke kecamatan yang tidak hadir dan tidak menguasai materi, masih kurangnya sosialisasi rencana pembangunan jalan strategis serta masih belum terakomodirnya usulan yang merupakan kewenangan provinsi (APDB provinsi) dan pusat (APBN)

Tabel 1.2
Daftar Penerima Dokumen Musrenbang Kabupaten Bandung 2016

No	SKPD	Yang Menerima	Yang Tidak Menerima	Jumlah
1	Badan / Lembaga	27	4	31
2	Kecamatan	31	-	31
3	Kelurahan	-	10	10
	Total	58	14	71

(Sumber : data yang di olah oleh peneliti dari laporan hasil musrenbang 2016 badan perencanaan dan pembangunan daerah kabupaten bandung)

Dari data di atas dapat dilihat, dalam penerima dokumen Musrenbang yang seharusnya tersebar dan dimiliki seluruh aspek baik badan / lembaga, kecamatan

dan kelurahan, tetapi hanya 58 yang menerima dari total keseluruhan 71 dari semua aspek baik di badan / lembaga, kecamatan dan kelurahan. Di tingkat kecamatan partisipasi dalam menerima dokumen Musrenbang sangat baik, tetapi sebaliknya di tingkat kelurahan yang seharusnya menerima atau membawa dokumen Musrenbang tidak ada yang menerima satupun.

Melihat dari data di atas dapat di simpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat relatif masih kurang dan belum maksimal. Dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai sidang musrenbang dapat menghambat tujuan pembangunan. Dari data tersebut diperlukannya partisipasi masyarakat yang aktif, sehingga dapat berpengaruh terhadap terwujudnya *good governance* (tata pemerintahan yang baik).

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**PENGARUH PELAKSANAAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MUSRENBANG DI KABUPATEN BANDUNG**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di jelaskan di atas, bahwa masih adanya gejala – gejala permasalahan lain selain tingkat kehadiran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dalam partisipasi masyarakat.

- a. Masih adanya anggota tim musrenbang ke kecamatan yang tidak hadir dan tidak menguasai materi.

- b. Masih kurangnya sosialisasi rencana pembangunan jalan strategis serta masih belum terakomodirnya usulan yang merupakan kewenangan provinsi (APDB provinsi) dan pusat (APBN)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti perlu merumuskan permasalahan dalam tulisan ini sebagai berikut :

Seberapa besar pengaruh pelaksanaa *good governance* terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kabupaten Bandung ?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelaksanaan *good governance* terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kabupaten Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini meliputi hal – hal sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat lebih memberikan manfaat dalam mengembangkan kembali ilmu khususnya teori – teori administrasi publik. Pembahasan yang akan di lakukan dalam penelitian ini di dasarkan atas berbagai teori yang peneliti anggap relevan dengan partisipasi masyarakat dan *good governance*. Serta di dasarkan data dan fakta yang ada di BAPPEDA Kabupaten Bandung.

2. Secara praktis

a. Bagi Peneliti

Mengembangkan wawasan, terutama bagi peneliti, dalam rangka menerapkan hasil – hasil studi administrasi public yang di kaitkan dengan partisipasi masyarakat agar dapat menjadi lebih baik.

b. Bagi instansi

Bagi Instansi terkait di jadikan sebagai bahan perbandingan dalam pentingnya partisipasi masyarakat guna terselenggaranya *good governance* di lingkungan instansi. hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan suatu hasil yang positif dalam mengembangkan *good governance* yang tepat lebih baik sehingga hasil yang di harapkan pun akan lebih optimal di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung.

c. Bagi umum

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan informasi bagi pihak yang berkepentingan dengan masalah yang di teliti oleh peneliti.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat di jadikan acuan untuk studi – studi lanjutan para peneliti dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama secara lebih mendalam.

F. Kerangka Pemikiran

Dasar pemikiran yang peneliti lakukan dengan penelitian ini mengenai partisipasi masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan *good governance*.

penelitian diawali dengan mendeteksi berbagai keadaan dan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan daerah kabupaten Bandung yang diduga berpengaruh terhadap penyelenggaraan *good governance*.

Teori yang saya akan gunakan adalah teori *Good Governance* dan teori Partisipasi Masyarakat. Teori *Good Governance* ini dikembangkan oleh Sedarmayanti. 2012. *Good Governance*. Bandung : Mandar Maju, dan digunakan untuk meneliti atau mempelajari mengenai pelaksanaan *Good Governance*. Teori ini mengindikasikan bahwa Prinsip – prinsip *Good Governance* menjadi indikator dalam pelaksanaan pemerintah. Prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang bercirikan pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:

- a. Transparansi
- b. Akuntabilitas
- c. Keterbukaan
- d. Aturan hukum

Teori partisipasi masyarakat dikembangkan oleh Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene Astuti D. 2009. *Desentralisasi dan Partisipasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: UNY, dan digunakan untuk meneliti atau mempelajari mengenai Partisipasi Masyarakat. Teori ini mengindikasikan bahwa Indikator yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di suatu organisasi menurut Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene Astuti membedakan partisipasi menjadi empat jenis,³ yaitu:

³ Irene, Siti Astuti D. 2012. *Desentralisasi dan Partisipasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: UNY hlm :61

1. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan.
2. Partisipasi Dalam Pelaksanaan.
3. Partisipasi Dalam Pengambilan Kemanfaatan.
4. Partisipasi Dalam Evaluasi.

Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Menurut Ndraha dan Cohen dan Hoff dalam Siti Irene Astuti D. ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: pertama, menggerakkan sumber daya dan dana. Kedua, kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga penjabaran program. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa

partisipasi masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan program merupakan satu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan. Secara singkat partisipasi menurut Cohen dan Uphoff.dalam Siti Irene Astuti dijelaskan dalam tahap-tahap sebagai berikut :

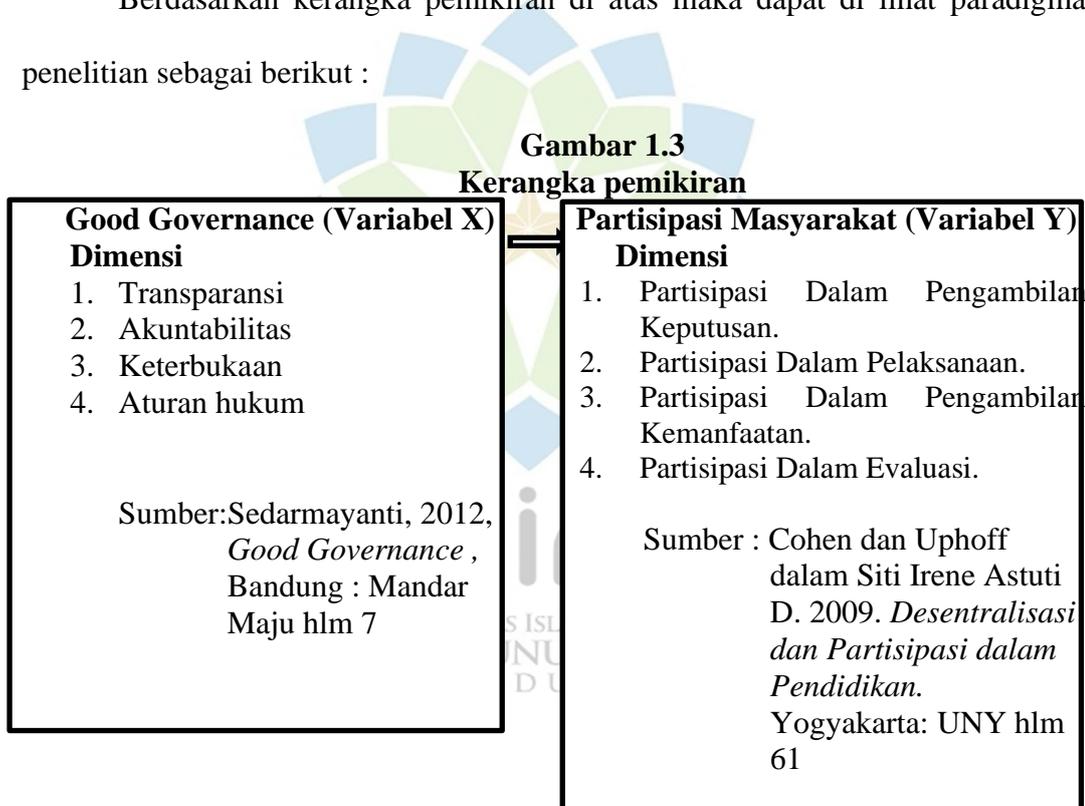
Tahap pelaksanaan program partisipasi antara lain;

- a. Pengambilan keputusan, yaitu penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.
- b. Pelaksanaan, yaitu penggerakan sumber daya dan dana. Dalam pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan.
- c. Pengambilan manfaat, yaitu partisipasi berkaitan dengan kualitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai.
- d. Evaluasi, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.

Variabel independen saya pelaksanaan *Good Governance* mempengaruhi atau menjelaskan variable dependen peningkatan Partisipasi masyarakat sebab

penerapan prinsip *Good Governance* yang menghubungkan antara pemerintah , sector swasta dan masyarakat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mempercepat pertumbuhan pembangunan bangsa serta dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahteran. jadi, partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan suatu Negara dalam mencapai tujuannya dan akan mewujudkan tata pemerintahan yang baik / *good governance*.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dapat di lihat paradigma penelitian sebagai berikut :



G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah di nyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. di katakana sementara, karena jawaban yang di berikan baru di dasarkan para teori yang relevan, belum di dasarkan pada fakta – fakta empiris yang di peroleh melalui pengumpulan data. jadi hipotesis juga dapat di nyatakan

sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. ⁴hipotesis yang di ajukan penulis adalah hipotesis asosiatif. menurut Sugiyono, hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variable atau lebih

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis peneliti pada penelitian ini adalah :

TERDAPAT PENGARUH PELAKSANAAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG DI KABUPATEN BANDUNG.



⁴ Sugiyono.2013. *Metode Penelitian Administrasi*.Bandung: Alfabeta. Hlm 70.

⁵ Ibid. hlm:77.